

RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025



DINAS KETAHANAN
PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Dengan demikian program ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada adanya kebijakan dan kinerja sektor yang terkait dengan program ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan daerah. Dengan berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) ini memuat antara lain ; potensi, kondisi saat ini, sasaran, arah kebijakan, program serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta rencana indikatif pendanaannya.

Renja-PD ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan Ketahanan Pangan ke depan sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Payakumbuh, Juli 2024

**KEPALA DINAS KETAHANANPANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**



EDVIDEL ARDA, S. IP

NIP. 19700124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	23
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	37
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	46
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL . .	56
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	58
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
BAB IV PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	14
Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023.....	24
Tabel 2.2 . Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	25
Tabel 2.3 Analisis Pencapaian Sasaran 2	26
Tabel 2.4 Analisis Pencapaian Sasaran 3	33
Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..	47
Tabel II.4 A Persandingan daftar kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 dengan rancangan Renja SKPD Tahun 2025.....	54
Tabel II.4 B Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	55
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	65
Tabel IV.1 Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025	79
Tabel IV-2 Usulan Program / Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional Sumber Dana APBN TA 2025.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Lampiran 2. Gender Budget Statement (GBS) Tahun 2025

Lampiran 3. Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2025

Lampiran 4. Cascading Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, di samping mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 juga memperhatikan kebijakan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Pangan Nasional dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan musrenbang serta isu-isu strategis lainnya/di bidang ketahanan pangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk :

- a. Memahami dengan lebih baik lingkungan internal dan eksternal Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

sehingga terjadi interaksi aktif dalam pelaksanaan tugas

- b. Menganalisa dan mengkaji secara rinci faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal
- c. Menetapkan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

b. Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

- a. Mengantisipasi perubahan lingkungan global yang terjadi begitu cepat seperti perkembangan teknologi dan informasi, sementara sumber daya yang tersedia begitu terbatas. Dengan adanya rencana strategis, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- b. Memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
- c. Mengetahui orientasi organisasi di masa yang akan datang
- d. Untuk meningkatkan komunikasi di antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturannya lainnya yang mengatur tentang tugas, fungsi dan uraian tugas serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, atau Program dan Kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awak RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Bab ini memaparkan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan maupun mengenai ketersediaan anggaran,

selain itu juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab instansi. Dari lima program yang ditetapkan, semua telah terlaksana, tingkat keberhasilannya telah dapat diwujudkan secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian jika dibandingkan dengan indikator keberhasilannya dapat terealisasi hampir 100%.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Trivulnar Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan trivulnar semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan trivulnar semester SKPD	48	Laporan	8.000.000	3	2.185.740	14	7.441.550	3	3.221.400	3	-	4	241.000	4	3.572.600	14	7.026.000	17	9.121.740	106,17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perawatan pemaduan layanan kepegawaian	100	%	64.200.000	100	11.195.000	100	13.695.000	100	13.689.000	100	-	100	-	100	-	100	13.689.000	100	15.884.000	
Pengadaan Pakisan Dinas Bersama Ambut Kelengkapannya	Jumlah paket pakisan dinas beserta atribut kelengkapannya	72	paket	40.124.700	18	12.125.000	22	13.695.000	22	13.689.000	22	-	-	-	-	-	22	13.689.000	41	15.884.000	
Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	4	Dokumen	15.964.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perawatan layanan umum termasuk standar	86	%	638.143.632	86	169.078.650	86	169.388.500	16	29.498.576	16	17.027.400	40	82.029.377	16	113.200.876	16	161.766.719	85	510.634.382	80,06
Penyediaan komponen instalasi listrik/pemangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pemangan bangunan kantor yang disediakan	26	paket	8.261.200	9	1.609.500	9	1.613.150	-	-	-	-	9	1.594.500	-	-	9	1.594.500	13	3.104.000	38,76
Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	20.000.000	7	20.695.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20.695.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	110	paket	55.126.880	61	16.288.600	52	13.526.000	10	5.707.330	10	580.000	10	4.692.400	22	1.804.300	52	12.991.600	113	18.879.680	62,29
Penyediaan barang cetakan dan pengemasan	Jumlah paket barang cetakan dan pengemasan yang disediakan	16	paket	31.264.720	3	9.394.120	4	8.139.130	1	60.000	1	1.215.000	1	2.057.750	1	3.124.000	4	6.456.750	7	16.840.870	48,10

	Penyetoran bahan bakar dan perantara perantara-undangan	Jumlah/dokumen bahan bakar dan perantara perantara-undangan yang disediakan	8	paket	34.368.800	2	8.392.200	2	8.392.200	2	2.127.600	2	709.200	2	2.836.800	2	2.718.600	2	8.392.200	4	16.784.400	48,84	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	20	laporan	2.400.000	-	-	5	1.850.000	1	699.000	1	200.000	1	529.500	3	315.000	6	1.743.500	6	1.743.500	87,66	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD	450	laporan	477.422.032	100	194.769.233	100	225.860.000	5	20.994.626	5	14.313.200	30	70.311.427	41	115.438.478	81	220.977.729	101	415.746.962	97,08	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana keantar dalam kondisi baik	85	%	136.190.000	85	70.466.500	85	77.721.600	15	17.040.000	15	-	15	590.000	-	41.273.800	15	68.893.800	85	129.269.500		
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	8	paket	80.800.800	-	-	3	8.658.000						1	11.640.000	3	11.640.000					
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	paket	46.100.000	1	1.771.000	3	21.777.600	1		1				580.000	3	12.428.000	3	12.008.000	4	14.779.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4	unit	10.000.000	6	68.695.500	4	44.289.000	2	27.040.000					2	17.203.000	4	44.245.000	10	112.948.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Citra dan Pemasarahan Daerah	Persentase layanan penunjang citra dan pemasaran daerah sesuai standar	86	%	127.882.442	86	37.370.424	86	61.722.164	15	18.669.202	15	9.998.142	30	20.628.400	26	20.622.487	15	61.648.281	85	99.018.666	77,75	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	laporan	6.000.000	1	1.850.000	1	1.494.500	1	500.000				1	500.000	1	490.000	1	1.490.000	1	3.340.000	55,67
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	laporan	4.466.000	1	838.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	838.062	18,64	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	laporan	135.806.442	1	34.682.372	2	60.227.664	1	10.009.202	1	9.998.142	1	20.018.400	1	20.132.487	2	60.138.231	3	94.848.903	81,19
	Pembelajaran Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kastor dalam kondisi baik	85	%	489.200.000	85	109.167.168	85	109.200.000	20	18.881.300	10	6.914.900	30	37.082.888	40	40.739.625	85	168.612.233	85	202.779.383	44,27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	Unit	156.760.000	1	29.572.745	1	39.190.000	1	5.220.000	1	1.500.000	1	8.978.000	1	18.543.750	1	34.241.750	1	63.815.495	40,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Permisinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	Unit	259.600.000	10	63.395.215	10	84.900.000	5	13.661.200	5	4.664.500	10	25.909.808	10	20.094.865	10	64.491.473	20	117.786.688	46,20
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	paket	43.940.000	11	7.288.200	2	5.110.000	-	-	1	750.000	1	2.185.000	2	1.995.000	2	4.940.000	13	12.218.200	27,83
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUHLATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masyarakat)	54	%	54.000.000	50,60	-	51	71.013.890	50,60	3.215.320	50,60	960.000	50,60	2.945.160	53,15	61.246.790	53,15	68.367.238	50,60	68.367.238	126,61
	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Peningkat Kemandirian Pangan serta Kemandirian Daerah Kabupaten Kota	Cadangan pangan masyarakat	18	%	54.000.000	14	-	16	71.013.890	14	3.215.320	14	960.000	14	2.945.160	27,03	61.246.790	27,03	68.367.238	14	68.367.238	126,61
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	3	kali	4.000.000	-	-	2	10.000.000	-	3.215.320	-	960.000	1	2.945.160	1	2.455.200	2	9.575.670	2	9.575.670	239,16
	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	13	unit	50.000.000	-	-	5	61.013.890	-	-	-	-	-	5	38.791.900	5	38.791.900	-	-	-	

	PROGRAM PEMINGKATAN DIMERSEKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- X masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	- 62,5 - 58,5	%	845.466.862	- 96,3 - 70,85	741.091.046	- 61 - 57	670.859.112	- 80 - 57	53.547.800	- 60 - 37	20.351.520	- 80,3 - 70,85	85.132.517	- 80,3 - 70,85	396.346.276	- 83,3 - 70,85	635.876.123	- 96,3 - 70,85	1.376.949.363	102,88
	Pengadaan dan Pengaliran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	- X Pengembangan usaha kelembagaan eska - Pensektoran distribusi pangan - Pensektoran informasi harga yang up to date	- 19 - 108	%	132.971.630	- 20 106	87.434.490	- 16 - 80	897.124.952	- 20 - 100	14.225.750	- 20 - 100	5.386.140	- 20 - 100	30.994.117	- 20 - 100	138.648.520	- 20 - 100	181.868.575	- 20 100	268.601.866	202,15
	Pengadaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	- Jumlah laporan informasi harga pangan dan neraca Bahan Makanan		8 laporan	12.465.048	1	72.285.150	2	12.900.000	1	6.956.200	1	398.000	1	2.019.660	1	1.879.900	2	12.820.170	3	95.156.320	682,83
	Pengadaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia		4 laporan	30.000.000			1	65.091.650					1	58.990.000	1	36.990.000					
	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		10 dokumen	39.659.056	1	5.491.520	1	492.261.002	1	6.080.180	1	4.158.140	1	26.533.457	1	6.242.000	1	45.994.685	2	51.486.005	126,39
	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan		8 unit	4.000.000	1	4.792.000	2	6.002.900	1	1.090.000	1	240.000	1	2.014.300	2	1.518.200	1	5.952.780	4	30.644.780	
	Pengembangan kelembagaan eska pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	Jumlah kelembagaan eska pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan		5 lembaga	6.707.435	1	4.356.020	5	500.000	1	126.400	1		5	246.500	5		5	482.900	6	5.348.920	79,04

	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	400	keluarga	50.000.000	-	-	150	62.423.100	-	-	-	150	57.016.040	150	57.016.040	150	57.016.040				
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Persentase cadangan pangan pemerintah sesuai SPM	66	%	70.000.000	62,12	14.627.200	65	64.407.400	62,12	339.020	62,12	-	62,12	682.000	70,11	62.680.840	70,11	64.301.668	62,12	70.929.160	112,75
	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan	16	ton	50.000.000	1	14.627.200	5,62	61.820.000	-	-	-	-	5,376	61.813.240	5,376	61.813.240	6	76.440.548		152,88	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	12	kali	20.000.000	-	-	1	2.697.400	1	999.020	1	-	1	682.000	1	866.800	1	2.407.820	1	2.407.820	12,44
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	-45 -23	%	642.535.232	-47 -45	639.029.250	-42 -20	408.447.060	-47 -15	38.383.000	-47 -15	14.965.280	-47 -15	132.536.400	-68,09 -29,79	203.525.700	-68,09 -29,79	390.400.400	-47 -15	1.029.439.700	
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita pertahun	Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita pertahun	4	dok	17.023.600	1	4.063.740	1	3.248.920	1	886.500	1	599.760	1	341.000	1	1.361.800	1	3.109.140	2	7.262.880	42,60

	Pemberdayaan masyarakat dalam penggerak aragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penggerak aragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4	dok.	534.000.000	1	626.406.940	1	345.177.000	1	36.985.000	1	14.345.620	1	83.953.900	1	193.038.020	328.242.540	2	964.749.380	172,34	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	4	dok.	71.511.652	1	8.558.670	1	60.020.130	1	511.500	1	-	1	49.241.500	1	9.125.800	38.878.800	2	67.437.470	94,30	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	89,30	Nilai	226.572.288	89,02	28.428.560	89	187.850.240	-	6.629.568	-	3.825.000	-	52.195.000	89,11	132.908.708	89,11	194.658.260	89,02	233.087.160	
	Penanganan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Perseentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	20	%	171.472.288	20	9.865.800	17	182.683.948	-	4.832.378	-	2.343.000	-	51.513.000	20	121.187.508	20	179.795.870	40	189.661.470	110,61
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawan pangan Kabupaten/Kota	3	laporan	8.323.380	1	4.780.500	1	9.016.940	1	1.700.920	1	1.705.000	1	1.023.000	1	4.338.200	1	8.787.120	2	13.587.620	152,77
	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan pengaliran cadangan pangan pada kerawan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan pengaliran cadangan pangan pada kerawan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	dok.	161.948.708	1	5.085.300	1	173.666.900	1	3.131.450	1	638.000	1	50.490.000	1	116.746.500	1	171.068.750	2	176.084.660	108,27

	Pengusutan Peta Kerenatan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50	%	55.500.000	50	10.563.100	50	15.166.400	-	1.797.190	-	602.000	-	602.000	50	11.701.200	50	14.862.500	100	33.425.400	60,25
	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta kerentanan dan ketahanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan Kerenatan Pangan yang dimutakhirkan	4	dokumen	55.500.000	1	10.563.100	1	15.166.400	1	1.797.190	1	602.000	1	602.000	1	11.701.200	1	14.862.500	2	33.425.400	60,25
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90,00	%	165.464.768	90	23.404.140	90	68.830.650	3	29.562.700	90	9.935.760	90	18.736.300	100	7.082.200	100	65.317.040	90	98.711.190	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	20	%	165.464.768	15	23.404.140	17	68.830.650	15	29.562.700	15	9.935.760	17	18.736.300	30,30	7.082.200	30,30	65.317.040	15	98.711.190	53,62

	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	4	dokumen	40.000.000	1	15.705.290	1	38.737.490	1	18.424.900	1	9.336.000	1	6.493.500	1	2.509.320	1	36.713.700	2	62.419.000	131,05
	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan pengaliran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	dokumen	125.494.768	1	7.698.850	1	30.073.200	1	11.137.900	1	589.780	1	12.902.800	1	4.562.940	1	28.603.320	2	36.302.170	28,95

Pajakumbuh, Januari 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

EDYDEL ARDA, S.I.P
NIP. 1970104 198003 1001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil dan indikator keluaran yang merupakan indikator mikro dalam pencapaian sasaran.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh periode Tahun 2023-2026, dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	19.735	22.662	114,83
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	85,10	87,3	102,58
3	Tingkat Keamanan pangan	Level	Tinggi	Tinggi	100,00
4	Stabilitas Harga				
	a. Beras	%	≤10	3,93	160,7
	b. Cabe	%	≤25	18,68	125,28
	c. Bawang	%	≤25	15,87	136,52
6	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	B	86,37

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022		%	Capaian Tahun 2023		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Ketersediaan Pangan Utama	%	19.725	22.571	114,42	19.735	22.662	114,83	Sangat baik	19.765	114,65

Sumber : DKP, 2023

Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dilihat dari indikator : ketersediaan pangan utama.

Capaian kinerja nyata indikator ketersediaan pangan utama adalah sebesar 22.662 ton dari target sebesar 19.735 ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga



persentase capaian kinerjanya adalah 114,83 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini hampir sama dari capaian tahun sebelumnya tetapi meningkat sedikit 0,41 Point.

Pangan merupakan kebutuhan esensial dan komoditas paling strategis dalam kehidupan manusia. Penyediaan pangan untuk konsumsi harus memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Salah satu masalah ketersediaan pangan adalah untuk mengetahui apakah

penyediaan pangan yang ada mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk. Untuk itu perlu dipahami situasi pangan disuatu daerah dalam periode tertentu, selanjutnya diupayakan strategi untuk mencapai ketahanan pangan.

Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 4
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022		%	Capaian Tahun 2023		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Konsumsi	%	85	85,09	100,10	85,10	87,3	102,58	Sangat baik	85,40	102,22
2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	tinggi	tinggi	100	tinggi	tinggi	100	Sangat baik	Tinggi	100

Sumber : DKP, 2023

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Kemanan Pangan.

A. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan (RPJMN) 2015-2019 ada empat (4) strategi utama :

1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Salah satu dari empat (4) arah kebijakan pangan yaitu perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dibidang ketahanan pangan yaitu pencapaian skor PPH Konsumsi.



Pentingnya pencapaian skor PPH Konsumsi tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Apabila keragaman konsumsi pangan dibawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan pangan dan gizi, peningkatan ketersediaan, serta pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi Tahun 2023 berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakkan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

Setelah dilakukan penghitungan PPH Konsumsi dengan Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein 57 gr/kapita/hr didapat nilai PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar 87.3 dengan capaian kinerja 102,58% termasuk kategori sangat baik.

B. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya

yang timbul dari makanan/minuman sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah

mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang “standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Dalam rangka pengawasan keamanan pangan di Kota Payakumbuh dilakukan pengujian terhadap sampel pangan segar. Sampel diambil di pasar Ibul Payakumbuh. Uji yang dilakukan adalah pengujian terhadap kandungan pestisida dan formalin.

Pengujian sampel dilakukan terhadap 30 sampel pangan segar diantaranya pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal ikan. Sampel pangan segar diambil dari Pasar Ibul Kota Payakumbuh. Pemeriksaan sampel dilakukan sebanyak 3 kali, yakni 2 kali uji residu pestisida dan 1 kali uji formalin.

Dari pemeriksaan terhadap 30 sampel yang terdiri dari residu pestisida 20 komoditi dan formalin 10 komoditi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

No	Pemeriksaan Yang Dilakukan	Jumlah sampel diperiksa	Hasil Analisa Yang Tidak Aman	% sampel makanan yang aman dikonsumsi	Ket
1.	Residu pestisida	20	0 komoditi	100%	tinggi
2.	Formalin	10	0 komoditi	100 %	tinggi
Tingkat Keamanan Pangan				100	Tinggi

Keterangan Level Tingkat Keamanan :

0 -60 % : Tidak Aman

61 – 75 % : Cukup

76 – 85 % : sedang

86 – 100 % : Tinggi

Jika diperhatikan perkembangan capaian Tingkat Keamanan Pangan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Tingkat Keamanan Pangan pada Tahun 2018 tercapai 100% dari target level sedang, begitu juga dari Tahun 2019- 2023 terealisasi 100% .Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Pangan dari Tahun 2017-2022, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan
Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Keamanan Pangan	Level	sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : DKP, 2023

Sasaran 3 Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022		% Realisasi	Capaian Tahun 2023		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap akhir renstra (%)
			Target			Target	Realisasi				
1	Stabilitas Harga										
	* beras	%	≤10	2,95	170,5	≤10	3,93	160,7	Sangat baik	10	160,7
	* cabe	%	≤25	32,74	69,04	≤25	18,68	125,28	Sangat baik	25	125,28
	* bawang	%	≤25	16,64	133,44	≤25	15,87	136,52	Sangat baik	25	136,52
	Rata-rata Capaian Kinerja		≤10		118,89	≤10		140,83	Sangat baik		140,83

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dilihat dari indikator : Stabilitas Harga Beras, Stabilitas Harga Cabe, dan Stabilitas Harga Bawang dengan rata-rata capaian kinerja 140,83% kategori sangat baik

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Beras adalah sebesar 3,93 % dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 160,7 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini sedikit mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Cabe adalah sebesar 18,68 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125,28% dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Bawang adalah sebesar 15,87 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136,52 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.

TABEL 2
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	12	13	14	15	15	16	
1.	Skor PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan		IKU	Nilai	88	88,5	89	89	88,05	88,77	89,02	89,11	-	-	- Dapat mengetahui keberagaman ketersediaan bahan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein
	Ketersediaan Pangan Utama			IKU	Ton	-	-	-	19.735	-	19.722	22.571	22.662	-	-	Penyediaan pangan yang di ukur menggunakan salah satu instrumen yang ada pada tabel Neraca Bahan Makanan (NBM) yaitu pengadaan/ penyediaan pangan (Food Supply)
2.	Skor PPH Konsumsi	Skor PPH Konsumsi		IKU	Nilai	83	84	85	85,1	83,7	84,2	85,09	85,1	87,3	-	- Dapat mengetahui pola konsumsi masyarakat yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu
	Tingkat Kemanan Pangan	Tingkat Kemanan Pangan		IKU	%	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	Untuk mengetahui kondisi pangan segar yang kemungkinan ada cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia

No.	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Ket/kriteria
					Satuan	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	12	13	14	15	15	16	
3.	Stabilitas Harga	Stabilitas Harga		IKU												
	- beras				%	10	10	10	10	1,53	1,78	2,95	3,93	10,00	10,00	Data dan informasi harga beras yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	- cabe				%	25	25	25	25	16,76	18,85	32,74	18,68	25,00	25,00	Data dan informasi harga cabe yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	- bawang				%	25	25	25	25	12,08	11,08	16,64	15,87	25,00	25,00	Data dan informasi harga bawang yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	Stabilitas Pasokan	Stabilitas Pasokan		IKU	%	77	77	77	-	79,00	79,00	79,00	-	-	-	Data dan informasi pasokan beras yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan

Payakumbuh, Juli 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama daerah dan terkait dengan isu strategis nasional sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena:
 - 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
 - 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
 - 3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
 - 4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen,

- yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
- 5) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
 - 6) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan;
 - 7) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
 - 8) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani;
 - 9) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta
 - 10) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.
 - c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energy dan pakan ternak.
 - d. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.

- e. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
- g. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian
- h. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
- i. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidaklancaran proses distribusi juga

merugikan produsen, karena di samping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain: keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;

- 1) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
- 2) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 3) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;
- 4) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 5) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganeekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh :

- a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
- b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;

- c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan
- d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

- a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;

- c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;
- d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi;
- e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Ritel Practices (GRP);
- f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;
- g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;
- i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke dalam negeri;
- k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;
- l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan
- m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

4. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja belum seperti yang diinginkan, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
- b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- c. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah Kota Payakumbuh belum optimal untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- d. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan,

- f. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program,
- g. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program,
- h. Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD mengakomodir Program Kegiatan yang sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 dan sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Dari Rancangan awal tersebut, masih banyak yang belum terakomodir kebutuhan Dinas, di sisi lain ada kegiatan yang dirasa tidak memerlukan dana yang besar tapi dialokasikan dengan dana yang cukup besar begitu juga sebaliknya. Untuk itu telah dilakukan review kembali dengan menambahkan catatan penting yang dapat dilihat pada Tabel 3 di lampiran Renja ini.

Untuk Program dan Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sudah sesuai hanya besaran nya yang masih belum cocok.

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

No.	Rancangan Awal RKPd Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.364.298.626	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.422.567.626	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	86	2.793.122.026	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	86,5	2.851.391.026	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	84.932.200	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	84.932.200	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	22.390.350	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	22.390.350	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	62.541.850	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	62.541.850	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	2.139.106.761	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	2.139.106.761	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 org	2.009.794.761	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 org	2.009.794.761	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	129.312.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	129.312.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	34.183.250	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	42.452.250	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	35 paket	23.011.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	31.280.000	pembelian baju tenun daerah

	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1 dok	11.172.250	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1 dok	11.172.250	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum sesuai standar	85%	197.417.050	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum sesuai standar	85%	197.417.050	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	1.608.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 jenis	1.608.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	34 jenis	16.209.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	38 jenis	16.209.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	8.250.850	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	8.250.850	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 paket	8.389.500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 paket	8.389.500	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	5.265.700	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	5.265.700	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	157.694.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	157.694.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	79.784.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	101.784.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	55 unit	62.034.000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	62.034.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	13.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2unit	35.000.000	Pembelian laptop
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	4.750.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	4.750.000	

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	126.788.865	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	126.788.865	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	33.765.890	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	33.765.890	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	93.022.975	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	93.022.975	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	130.909.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	168.909.900	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	42.950.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	42.950.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	78.800.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	116.800.000	Kekurangan biaya pemeliharaan kendaraan 4 1 unit lagi
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 paket	9.159.900	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 paket	9.159.900	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)	53%	17.857.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)	54%	17.857.000	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%cadangan pangan masyarakat	17%	17.857.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%cadangan pangan masyarakat	18%	17.857.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	2 kali	17.857.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	2 kali	17.857.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan kases pangan	- 62 % - 58%	435.749.750	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan kases pangan	- 62,5 % - 58,5%	435.749.750
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan		- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	- 18% - 100%	153.700.400	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan		- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	- 19% - 100%	153.700.400
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 keluarga	47.137.000	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40 keluarga	47.137.000
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota		Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/Kota	5 kegiatan	87.462.900	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/Kota	5 kegiatan	87.462.900
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	19.100.500	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	19.100.500
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		- Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	- - 65%	57.325.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		- Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	- - 66%	57.325.000
	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan	1,5 ton	26.346.000	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan	2 ton	26.346.000

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	'39,962 ton	30.979.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	'39,962 ton	30.979.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	- 44% - 22%	224.724.350	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	- 45% - 23%	224.724.350
Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dok	20.755.750	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dok	20.755.750
Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	203.968.600	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	203.968.600
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Skor PPH Ketersediaan	89,20	47.246.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Skor PPH Ketersediaan	89,30	47.246.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	19%	17.430.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	20%	17.430.000
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota		jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	17.430.000	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota		jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	17.430.000

	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	29.816.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	29.816.000	
	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 dok	29.816.000	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 dok	29.816.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	70.323.850	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	70.323.850	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	-19%	70.323.850	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	-20%	70.323.850	
	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	36.539.750	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	36.539.750	
	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	33.784.100	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	33.784.100	

Payakumbuh, Juli 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan untuk Dinas Ketahanan Pangan ada 1 (satu) usulan yaitu dari Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Timur yaitu Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu.

Adapun usulan tersebut dapat diterima dengan jumlah sesuai hasil peninjauan dan jumlah dana yang tersedia.

Usulan melalui Pokok Pikiran atau dari Pemangku Kepentingan tidak ada.

Sedangkan usulan melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, tidak ada usulan Program Kegiatan dari para *stakeholder*. Akan tetapi pada dasarnya para stakeholder mendukung setiap Program Kegiatan yang dilakukan Dinas apabila dialokasikan untuk mereka.

TABEL 4 A.
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2024 DENGAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024					Kegiatan sesuai Renja SKPD Tahun 2025		
NO	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kel)	Indikator Kinerja	Vol	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2025	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu	Balai Jaring Kec. Payakumbuh Timur	Skor PPH Konsumsi		Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Rp203.968.850	Dapat diterima dengan jumlah peserta pelatihan menyesuaikan

Payakumbuh, Juli 2024
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S.IP
 NIP. 19700124 199003 1 001

TABEL 4 B.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan

NO	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Kel)	Indikator Kinerja	Besaran / Vol	Catatan
1	2	3	4	5	8
	NIHIL				

Payakumbuh, Juli 2024
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S.JP
 NIP. 19700124 199003 1 001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap pembangunan ketahanan pangan di daerah, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang utama. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional adalah untuk:

1. Meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan;
2. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
2. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis;
3. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- 1) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- 2) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;
- 3) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- 4) Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

1. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
2. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;
3. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar;
4. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain:

- a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
- b) peningkatan kerjasama dengan mitra kerja,
- c) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta
- e) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

1. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan
2. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
3. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.1-1317 Tahun 2023

Program ,kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 adalah :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target Capaian Program : Nilai IKM 85,5

Kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan

- b. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- c. Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- b. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai

4. Administrasi Umum

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan bahan logistik kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Fasilitasi kunjungan tamu
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- a. Pengadaan mebel
- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

6. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

**B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

Target Capaian Program :

- % Cadangan pangan yang tersedia (masyarakat dan Pemerintah daerah) 53%

Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/kota
Sub kegiatan :
 1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik

C. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Target Capaian Program :

- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE 62%
- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan 58%

Kegiatan :

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - b. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota
Penyediaan informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota
 - c. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota
 - b. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/tahun
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya Lokal

D. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Target Capaian Program : Skor PPH Ketersediaan 89,20

Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan, pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota

E. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Target Capaian Program : Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi 90%

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segardaerah Kabupaten/Kota
- b. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PANGAN				3.364.298.626	DAU			3.807.786.858
	DINAS KETAHANAN PANGAN				3.364.298.626				3.807.786.858
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Payakumbuh		2.793.122.026				3.059.419.558
2.09.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai IKM		86	84.932.200	DAU		86,5	95.856.000
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dok	22.390.350	DAU		3 dok	28.170.050
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 dok	62.541.850	DAU		6 dok	67.685.950
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas		90%	2.139.106.761	DAU		90%	2.293.851.116
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		17 org	2.009.794.761	DAU		19 org	2.157.155.116
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dok	129.312.000	DAU		12 dok	136.696.000

2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian		100%	34.183.250	DAU		100%	60.000.000
2.09.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		35 paket	23.011.000	DAU		38 paket	35.000.000
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja		1 dok	11.172.250	DAU		1 dok	25.000.000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum sesuai standar		85%	197.417.050	DAU		85%	240.393.500
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		7 jenis	1.608.000	DAU		8 jenis	1.613.150
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		34 jenis	16.209.000	DAU		38 jenis	18.526.000
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		4 paket	8.250.850	DAU		4 paket	9.862.150
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 paket	8.389.500	DAU		2 paket	8.392.200
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		5 laporan	5.265.700	DAU		5 laporan	7.000.000
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 laporan	157.694.000	DAU		100 laporan	195.000.000

2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik		85%	79.784.000	DAU		85%	90.000.000
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		55 unit	62.034.000	DAU		2 unit	50.000.000
2.09.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		2 unit	13.000.000	DAU		1 unit	20.000.000
2.09.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	4.750.000	DAU		1 unit	20.000.000
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar		85%	126.788.865	DAU		85%	140.821.192
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	33.765.890	DAU		2 laporan	40.500.000
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 Laporan	93.022.975	DAU		1 Laporan	100.321.192
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		85%	130.909.900	DAU		85%	138.497.750
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 unit	42.950.000			1 unit	39.190.000
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		10 unit	78.800.000	DAU		10 unit	90.000.000

2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		3 paket	9.159.900	DAU		3 paket	9.307.750
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)		53%	17.857.000			54%	25.000.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%cadangan pangan masyarakat		17%	17.857.000	DAU		18%	25.000.000
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik		2 kali	17.857.000	DAU		2 kali	25.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan kases pangan		- 62 % - 58%	435.749.750	DAU		- 62,5 % - 58,5%	563.367.300
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date		- 18% - 100%	153.700.400	DAU		- 19% - 100%	210.000.000
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		30 keluarga	47.137.000	DAU		40 keluarga	65.000.000
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kab/Kota		5 kegiatan	87.462.900	DAU		5 kegiatan	120.000.000
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 dokumen	19.100.500	DAU		1 dokumen	25.000.000

2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Persentase cadangan pangan pemerintah daerah		65%	57.325.000	DAU		66%	97.000.000
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan		1,5 ton	26.346.000	DAU		2 ton	52.000.000
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara		39,962 ton	30.979.000	DAU		39,962 ton	45.000.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu		- 44% - 22%	224.724.350	DAU		- 45% - 23%	256.367.300
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1 dok	20.755.750	DAU		3 kali	36.124.850
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekeagaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		1 Laporan	203.968.600	DAU		- 44% - 22%	220.242.450
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan		89,20	47.246.000	DAU		89,3	60.000.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait		50%	29.816.000	DAU		50%	35.000.000
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan		1 dok	29.816.000			1 dok	35.000.000

2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan		- 19%	17.430.000			20%	25.000.000
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota	jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi		1 dokumen	17.430.000			1 dokumen	25.000.000
2.9.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		90%	70.323.850			90%	100.000.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan		- 19%	70.323.850			- 20%	100.000.000
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	33.784.100			1 dokumen	45.000.000
2.09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		1 dokumen	36.539.750			1 dokumen	55.000.000

Payakumbuh, Juli 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

4.1. Rencana Kerja

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah 1 (satu) Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ditambah 4 (empat) program yaitu **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan**, **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, **Program Penanganan Kerawanan Pangan** dan **Program Pengawasan Keamanan Pangan**.

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Kegiatan :

- 1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh pendukung kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistic

Sub kegiatan ini berupa rapat-rapat serta pembinaan terhadap beberapa Lumbung Pangan, heler dan Penggilingan Padi Kecil yang ada di Kota Payakumbuh.

Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah**

Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi dan pasokan harga pangan

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan upaya ketahanan pangan keluarga dengan memberikan bantuan bibit buah-buahan yang bernilai ekonomi. Selain itu sub kegiatan ini juga memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait peningkatan ketahanan pangan keluarga sehingga dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang arti penting ketahanan pangan..

2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kab/Kota

Sub kegiatan ini memantau harga pangan masyarakat sebanyak 365 hari, memantaau stok pangan dan pasokan sebanyak 52 kali.

Sasaran Pemanfaatan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat memantau harga pada tingkat produsen, pedagang dan konsumen

3. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Neraca Bahan Makanan (NMB) merupakan alat untuk menyusun kebijakan perencanaan pangan yaitu mengukur ketersediaan energi masyarakat yang ditetapkan secara detil sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kap/hari. Selain itu NBM ini juga bermanfaat untuk evaluasi terhadap pengadaan dan penggunaan pangan, membuat perencanaan produksi/pengadaan pangan dan dijadikan bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi.

Kegiatan :

2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan masyarakat dalam waktu tertentu (musibah).

Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemerintah desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 berkewajiban mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah. Untuk hal itu, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyediakan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah (CPPD) mencapai 17,016 ton. Pada Tahun 2025 direncanakan penambahan 1,5 ton. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota Payakumbuh saat ini berjumlah 40.206,10 kg Pengadaan cadangan pangan pokok metodenya bekerjasama dengan Perum Bulog.

2. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan mengelola cadangan pangan pemerintah untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat, menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat serta untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

Kegiatan :**3. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi****Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun

Sub kegiatan ini melakukan penghitungan skor PPH Konsumsi yang berdasarkan kepada buku Neraca Bahan Makanan. Adapun tujuannya adalah untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local. Melalui kegiatan ini dilakukan beberapa upaya diversifikasi pangan, dimulai dari pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan saja, sampai dengan aspek pengolahan, upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi sebagai upaya untuk pengembangan sumberdaya masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Program Penanganan Kerawanan Pangan :

Kegiatan :

1. Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu tools early warning system dalam penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pangan dan gizi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan tentang pentingnya penyediaan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk keperluan perencanaan dan evaluasi program sekaligus sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah rawan Pangan dan Gizi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), bahwa penyelenggaraan SKPG menjadi tanggung jawab pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, yang selanjutnya akan menjadi bahan informasi daerah terkait situasi kewaspadaan pangan dan gizi di wilayahnya, yang

disusun secara periodic oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Sub kegiatan ini berisi pembuatan laporan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)

Kegiatan :

2. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan

Sub kegiatan ini berisi pembuatan laporan FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas)

FSVA menyediakan informasi bagi pengambil keputusan sebagai salah satu dasar dalam menyusun perencanaan program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi dan upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan. Penyusunan FSVA Kabupaten/kota merupakan upaya untuk mempertajam analisis FSVA Nasional dan Provinsi sehingga permasalahan pangan, kemiskinan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini melakukan uji sampel terhadap pangan segar dan melakukan sosialisasi keamanan pangan segar. Tujuan sub kegiatan ini untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri dan lain-lain. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbu.

2. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini melakukan sosialisasi pangan segar bersertifikasi dan kepada pelaku usaha. Tujuan dari sub kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan dan pangan bersertifikasi.

7.2. Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2025 yang dibiayai oleh APBD Kota Payakumbuh, merupakan program prioritas Kota Payakumbuh, dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2024, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sebesar Rp. 3.364.298.626,- Dengan rincian sebagaimana pada Tabel lampiran ini

Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KETAHANAN PANGAN						3.364.290.626,00							3.887.796.850,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.364.290.626,00							3.887.796.850,00		
	2.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3.364.290.626,00							3.887.796.850,00		
	1.	2.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai IKM Dinas Kerahan Pangan	-		86,00 index	2.793.122.026,00						-	3.659.419.558,00		
		2.06.01.2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	-		85 %	84.832.200,00			Memperku 1.Reformasi Politik, Hukum, dan Elinokrasi, serta Memp erkuat Per egahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Katahanan Pangan	-	95.860.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	22.300.350,00	Kota Paysikumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peringk tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		28.170.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	82.541.850,00	Kota Paysikumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peringk tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		67.686.990,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	-			90 %	2.139.106.761,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Menguatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	2.283.851.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.009.794.761,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Menguatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		2.157.155.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	139.312.000,00	Kota Pajakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memp erkuat Pen egabatan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		136.898.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian	-			100 %	34.183.250,00			Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memp erkuat Pen egabatan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	23.011.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Penguatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	11.172.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Penguatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Sesuai Standar	--			85 %	197.417.050,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	240.393.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.608.000,00	Kota Pajekumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.613.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Ditealokan				34 Paket	16.209.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		18.528.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Ditealokan				4 Paket	8.250.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		8.862.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0009		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	8.389.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku 1 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		8.382.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.06.01	2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5.265.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku 1 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.06.01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	157.894.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memp erkuat Pen egahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Sarang Milk Daerah Perungjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	-			85 %	79.794.000,00			Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memp erkuat Pen egahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPSI TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	82.034.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0008		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	13.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.750.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar	-			95 %	126.788.885,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	140.821.182,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daye Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	33.765.660,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen egakan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		40.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80.022.675,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen egakan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		100.321.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kontrol dalam kondisi baik	-			85 %	130.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pergerakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	138.497.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER LUMUM-DANA ALOKASI LUMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pergerakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		38.190.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENY OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Diner Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	78.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku s Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Peme rintasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	9.159.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku s Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Peme rintasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		9.307.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase odangan pangan yang tersedia (Masyarakat+Penda)	-			53,00 %	17.857.000,00						-	25.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.06.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	-			17 %	17.857.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan - peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, bertaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.06.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laperan	17.857.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Dese	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan - peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, bertaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	-			50,00 % 62,00 %	435.749.750,00						-	563.367.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase Pengebangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan 2. Persentase Informasi Harga yang Up to Date	-			16 % 100 %	153.700.400,00			Menantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Parekonomian yang berkualitas, unggul, bertaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	47.137.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Parekonomian yang berkualitas, unggul, bertaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		66.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten Kota				5 laporan	87.482.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Parekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.08.03.2.01.0016		Fenyelesaian Meraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Meraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	18.100.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Parekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-			85 %	57.325.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan - peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	97.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1,5 Ton	26.148.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan - peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		52.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang Japelhar				38.982 Ton	30.679.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.00.1.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Persentase Masyarakat yang Mengalami Diversifikasi Konsumsi Pangan 2. Persentase Masyarakat yang Jeleh Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Man Bera Non Terigu				44 % 22 %	224.724.300,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		258.367.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.00.1.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENY OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tarjet Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	20.756.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemenditta n Bangsa Melalui Sw asembata Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yarah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Meningkati an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan - peternakan dan perikanan 2. Peningka tan Peroko nomian yang berkualitas unggul, bertaya sahng bertasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		38.124.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.06.03.2.04.0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Bebas Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Bebas Sumber Daya Lokal				1 Laporan	200.868.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemenditta n Bangsa Melalui Sw asembata Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yarah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Meningkati an nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan - peternakan dan perikanan 2. Peningka tan Peroko nomian yang berkualitas unggul, bertaya sahng bertasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		220.242.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.06.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH ketersediaan	-			89,20 skor	47.246.800,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait	-			50 %	29.818.000,00			Memerap kan Sistem Pertahanan Kasamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yahat, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkat kan nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan 2. Peningta tan Peroko nomian yang berkualitas unggul, bertaya saing bertbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.08.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Kelangkaan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	29.818.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Ka/Desa	DAWA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memerap kan Sistem Pertahanan Kasamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yahat, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkat kan nilai tambah dan produktifita s Pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan 2. Peningta tan Peroko nomian yang berkualitas unggul, bertaya saing bertbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.02	Pertanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan	-			10 %	17.430.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 2. Peningkatan Perkeonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.08.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Kota														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Kota				1 Dokumen	17.430.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 2. Peningkatan Perkeonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	2.08.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	-			90,00 %	70.321.650,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.06.06.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan	-			16 %	70.323.850,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemendiran Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekono mi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekon omian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.06.06.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.704.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemendiran Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekono mi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekon omian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.06.06.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENY OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	36.638.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, bertaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
J U M L A H															1.807.786.650,00	

Untuk Tahun 2025 usulan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 Kota Payakumbuh dengan sumber dana APBN/APDB Propinsi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 7 : PROGRAM / KEGIATAN K / L YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

NO	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	USULAN PAGU (Rp)	LOKASI		KET.
								PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NIHIL									
TOTAL										

Payakumbuh, Juli 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

BAB V PENUTUP

Secara umum isi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sampai saat ini harus dapat terus ditingkatkan untuk kegiatan tahun berikutnya, sejalan dengan makin mantapnya pemahaman tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta seiring dengan budaya kerja profesional yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dan kualitas hasil kerja.

Menyadari bahwa kemampuan sumber daya yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan sangat terbatas terutama kuantitas personil, maka guna mewujudkan agar tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan sangat diperlukan dukungan berbagai pihak terutama stake holder terkait baik pemerintah maupun swasta, dan yang tidak kalah penting adalah adanya peran serta aktif dari masyarakat.

Payakumbuh, Juli 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP

NIP. 19700124 199003 1 001





Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya ketersediaan pangan.	1. Ketersediaan pangan utama	19.755 ton
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.	2. Skor PPH Konsumsi	85,30
	3. Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi
3. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan.	4. Stabilitas Harga <ul style="list-style-type: none">- Beras- Cabe- Bawang	≤10% ≤25% ≤25%

Payakumbuh, Agustus 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS KETAHANAN PANGAN

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan Gender (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) Pemerintah berusaha menekan konsumsi beras dan terigu dengan mengeluarkan PP no 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 2) Masih rendahnya konsumsi olahan pangan lokal 3) Peraturan Presiden No 22 Thn 2009 tentang kebijakan pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 4) Permentan No 43 Thn 2009 tentang Gerakan percepatan pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 5) Masih rendahnya konsumsi olahan pangan lokal dilihat dari Data PPH Konsumsi 2023 konsumsi pangan lokal umbi-umbian 36 gr perkapita/hari dari yang seharusnya 126 gr/kapita/hari	1). Dari aspek akses - pengolahan pangan lokal kurang diminati oleh kaum pria, wanita sudah ada mengolah pangan lokal - akses tidak terlalu berpengaruh karena pangan lokal sangat mudah diakses bagi kaum pria ataupun wanita 2). Partisipasi keaktifan kaum laki-laki dalam hal ini masih terbatas dikarenakan kaum laki-laki merasa kegiatan ini merupakan pekerjaan perempuan 3). Dari aspek Kontrol keterbatasan kaum pria dalam kegiatan ini mengakibatkan kontrol mereka terhadap kegiatan ini sangat terbatas, kecuali cheff pria. 4). Dari aspek Manfaat, tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat.	1). Masih belum mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan 2). Pelatihan yang diadakan hanya untuk anggota PKK, KWT dan Dasawisma (kaum wanita) 3. Belum tersedianya data pilah gender	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Laki-laki masih kurang keikutsertaan dalam pengolahan pangan lokal	A) Tujuan : *) Meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam mengolah pangan lokal B) Aktifitas : *) Melakukan pembinaan terhadap KWT dan Dasawisma dan PKK *) *) Melaksanakan pelatihan dan lomba pengolahan pangan lokal	Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu, Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman, Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal Sub Kegiatan : Pembedayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Aktivitas 1 : Melakukan pelatihan pangan lokal non beras non terigu Aktivitas 2 : Melaksanakan Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman 3 : Melaksanakan sosialisai konsumsi pangan lokal	Input : PKK, KWT dan Dasawisma Output : Meningkatnya pengetahuan anggota PKK, KWT dan Dasawisma Outcomes : Meningkatnya kreatifitas dalam pengolahan pangan lokal	Input : Dana yang dibutuhkan sebanyak Rp. 155.203.750,- Panitia pelaksana dari Dinas Ketahanan Pangan , peserta pelatihan pangan lokal non beras non terigu sebanyak 75 orang, peserta sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman sebanyak 30 orang, peserta sosialisasi konsumsi pangan lokal sebanyak 30 orang Out put : Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Out comes : Meningkatnya keanekaragaman pangan lokal yang diolah masyarakat hingga bernilai ekonomi .
Sub Kegiatan : Pembedayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan kemampuan PKK, KWT/Masyarakat dalam mengkreasikan olahan pangan lokal								

Sumber: Gender Analysis Pathway (GAP) and Policy Outlook for Action Plan (POP) ; Bappenas & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (2007)

Payakumbuh, 27 Maret 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



EDVIDEL ARDA, S.IP

Nip. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS KETAHANAN PANGAN

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan Gender (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Pengawasan Keamanan Pangan	Masih ditemukan pangan yang belum aman untuk dikonsumsi pada cabe. Dari data uji logam berat pada 20 beras yang dibeli ditempat yang berbeda ada kandungan logam berat tetapi dibawah batas maksimal (residu)	1). Dari aspek akses Karena terkait pangan di Rumah Tangga, lebih dominan ibu Rumah Tangga dibanding laki-laki kecuali single parents 2). Dari aspek Kontrol aspek ini dilakukan oleh Dinas dengan uji labor bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki 3). Dari aspek Manfaat kegiatan ini memberikan manfaat yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat 4).Aspek peran laki-laki dan perempuan. Dominan peran perempuan karena terkait pangan di Rumah Tangga	1). Kemampuan uji labor terhadap pangan Rumah Tangga dengan test kit masih terbatas 2) belum memiliki labor 3) Kita belum memiliki SDM laki-laki dan perempuan untuk Analisis Laboratorium	1).Terkait pangan perlu Temu Teknis dengan stakeholder 2). Perlu pembinaan pada produsen pangan segar 3) Produsen tidak patuh terhadap SOP dalam penanggulangan penyakit	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Temu Teknis penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Input : Stakeholder terkait keamanan pangan Output : - Hasil uji labor pestisida dan logam berat - Temu teknis Outcomes : Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	In put : Dana yang dibutuhkan sebanyak Rp.55.731.251 masyarakat yang mengikuti temu teknis Out put : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Out comes : Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan
Sub Kegiatan : Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan						Sub Kegiatan : Penguatan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
Tujuan : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar						Aktivitas 1 : Pengambilan sampel sayur buah untuk uji pestisida 2. Pengambilan sampel beras untuk uji logam berat 3. Melaksanakan temu teknis 2x setahun setelah pengambilan sampel dan uji labor selesai		

Sumber: Gender Analysis Pathway (GAP) and Policy Outlook for Action Plan (POP) ; Bappenas & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (2007)

Payakumbuh, 27 Maret 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP

Nip. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER BUDGET STATEMENT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Pengawasan Keamanan Pangan		
Sub Kegiatan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
Kode kegiatan	2.09.05.2.01.01		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none">Kota Payakumbuh merupakan daerah penghasil komoditi pangan yang cukup seperti beras, sayur-sayuran,daging,ikan tetapi dalam konsumsi masih jauh dari target.Pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat.Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri dan lain-lain. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none">Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian GenderKarena terkait pangan di Rumah Tangga, lebih dominan ibu Rumah Tangga dibanding laki-laki yang peduli terhadap keamanan pangan		
Rencana Tindak	Kegiatan	Melaksanakan Temu Teknis Penguatan Kelembagaan, Pengujian sample pangan segar dan Menyebarkan media komunikasi Informasi dan edukasi	
	Tujuan	Meningkatkan/menguatkan kelembagaan keamanan pangan	
	Aktivitas 1	Temu Teknis Penguatan Kelembagaan	
	Aktivitas 2	Pengujian sampel pangan segar	
	Sumber Daya/Input	Masyarakat yang mengikuti temu teknis	
Output	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 55.731.251,-	
	SDM	Masyarakat Kota Payakumbuh yang mengikuti temu teknis	
Dampak / Hasil / Manfaat	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar		

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S. IP

NIP. 19700124 199003 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Jambu Kel Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh

GENDER BUDGET STATEMENT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Kode kegiatan	2.2.09.03.2.04.02		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local. Mellaui kegiatan ini dilakukan beberapa upaya diversifikasi pangan, dimulai dari pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan pangan saja, sampai dengan aspek pengolahan, upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi sebagai upaya untuk pengembangan sumberdaya masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender - Kegiatan hanya difokuskan pada KWT, PKK dan Dasawisma (kaum wanita) - Kurangnya minat kaum pria pada kegiatan ini 		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu, Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman, Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal serta Gelar Pangan lokal	
	Tujuan	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengkreasikan olahan pangan lokal non beras non terigu sehingga menjadi makanan yang bernilai, lezat, bergizi, bersaing dan diminati oleh anak-anak dan masyarakat	
	Aktivitas 1	Pelatihan keterampilan anggota KWT dan Dasawisma dan KWT untuk mengkreasikan olahan pangan lokal non beras non terigu	
	Aktivitas 2	Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	
	Aktivitas 3	Pelatihan pengolahan pangan lokal	
	Aktivitas 4	Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal	
	Sumber Daya/Input	a. Modul Pelatihan Keterampilan b. KWT, Dasawisma, TP PKK c. Narasumber	
	Output	a. 1 Modul Pelatihan Per Orang b. Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anggota KWT, PKK dan Dasawisma	
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 181.242.450,-	
	SDM	Anggota PKK, Anggota KWT dan Dasawisma, Kader masyarakat, Kepala Sekolah / tenaga pendidik serta siswa SD, SMP dan SMA	
Dampak / Hasil / Manfaat	Meningkatnya keanekaragaman pangan lokal yang diolah masyarakat hingga bernilai ekonomi .		

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S. IP

NIP. 19700124 199003 1 001

